



**BUPATI MUARO JAMBI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI  
NOMOR 87 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

- Menimbang** : - bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.517.553.705.721,92
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 99.627.400.400,77
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.117.064.939.828,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	Rp. 300.861.365.493,15
2. Belanja	Rp. 1.577.731.344.036,34
a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 829.701.478.695,34
b. Belanja Langsung	Rp. 748.029.865.341,00
3. Pembiayaan	Rp. 60.177.638.314,42
a. Penerimaan	Rp. 65.177.638.314,42
b. Pengeluaran	Rp. 5.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaaan Rp. 0,00

#### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Muaro Jambi ini.

#### Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Muaro Jambi ini.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Muaro Jambi ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di tetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI MUARO JAMBI,

MASNAH

Diundangkan di Sengeti  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

MHD. FADHIL ARIEF

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 87



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**RINGKASAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Hal 1 dari 9

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.517.553.705.721,92</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>99.627.400.400,77</b>
1.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	47.074.818.005,77
1.1.1.06.	PAJAK HOTEL	53.000.000,00
1.1.1.06.01.	HOTEL	8.000.000,00
1.1.1.06.08.	RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH)	45.000.000,00
1.1.1.07.	PAJAK RESTORAN	1.000.000.000,00
1.1.1.07.02.	RUMAH MAKAN	800.000.000,00
1.1.1.07.07.	JASA BOGA/ KATERING	200.000.000,00
1.1.1.08.	PAJAK HIBURAN	571.500.000,00
1.1.1.08.11.	TAMAN HIBURAN	570.000.000,00
1.1.1.08.12.	HIBURAN INSIDENTIL	1.500.000,00
1.1.1.09.	PAJAK REKLAME	1.000.000.000,00
1.1.1.09.01.	REKLAME PAPAN/BILLBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON	1.000.000.000,00
1.1.1.10.	PAJAK PENERANGAN JALAN	17.769.806.456,00
1.1.1.10.01.	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI	800.000.000,00
1.1.1.10.02.	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN	16.969.806.456,00
1.1.1.11.	PAJAK PARKIR	60.000.000,00
1.1.1.11.01.	PAJAK PARKIR	60.000.000,00
1.1.1.12.	PAJAK AIR TANAH	100.000.000,00
1.1.1.12.01.	PAJAK AIR TANAH	100.000.000,00
1.1.1.13.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	30.000.000,00
1.1.1.13.01.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	30.000.000,00
1.1.1.14.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.500.000.000,00
1.1.1.14.37.	MINERAL BUKAN LOGAM DAN LAINNYA	2.500.000.000,00
1.1.1.15.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	5.960.511.549,77
1.1.1.15.01.	PBB PERDESAAN	5.960.511.549,77
1.1.1.16.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	18.030.000.000,00
1.1.1.16.01.	BPHTB - PEMINDAHAN HAK	18.030.000.000,00
1.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	24.502.710.000,00
1.1.2.01.	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	18.701.600.000,00
1.1.2.01.01.	PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	900.000.000,00
1.1.2.01.05.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9.000.000.000,00
1.1.2.01.07.	RUMAH SAKIT UMUM SUNGAI BAHAR	6.800.000.000,00
1.1.2.01.08.	RUMAH SAKIT UMUM SUNGAI GELAM	2.001.600.000,00
1.1.2.02.	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	150.000.000,00
1.1.2.02.01.	PENGAMBILAN/PENGUMPULAN SAMPAH DARI SUMBERNYA KE LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA	150.000.000,00
1.1.2.06.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	150.000.000,00
1.1.2.06.02.	LOS	115.000.000,00
1.1.2.06.03.	KIOS	35.000.000,00
1.1.2.07.	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	344.890.000,00
1.1.2.07.03.	RETRIBUSI PKB - MOBIL PENUMPANG - MINIBUS	125.000,00
1.1.2.07.06.	RETRIBUSI PKB - MOBIL BARANG/ BEBAN - PICK UP	194.780.000,00
1.1.2.07.08.	RETRIBUSI PKB - MOBIL BARANG/ BEBAN - TRUCK	149.985.000,00
1.1.2.14.	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	450.000.000,00
1.1.2.14.01.	PEMANFAATAN RUANG UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI	450.000.000,00
1.1.2.15.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	1.025.000.000,00
1.1.2.15.05.	ALAT BERAT	225.000.000,00
1.1.2.15.06.	RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN	800.000.000,00
1.1.2.17.	RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN	1.000.000,00
1.1.2.17.05.	JASA PELELANGAN SERTA FASILITAS LAINNYA YANG DISEDIAKAN DI TEMPAT PELELANGAN	1.000.000,00
1.1.2.18.	RETRIBUSI TERMINAL	10.220.000,00
1.1.2.18.01.	PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR UNTUK KENDARAAN PENUMPANG DAN BIS UMUM	5.110.000,00
1.1.2.18.03.	FASILITAS LAINNYA DI LINGKUNGAN TERMINAL	5.110.000,00
1.1.2.21.	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	20.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.1.2.21.01	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SEBELUM DIPOTONG	20.000.000,00
1.1.2.23.	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	600.000.000,00
1.1.2.23.01	PELAYANAN TEMPAT REKREASI	600.000.000,00
1.1.2.25.	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	50.000.000,00
1.1.2.25.01	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH	50.000.000,00
1.1.2.26.	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	3.000.000.000,00
1.1.2.26.01	PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	3.000.000.000,00
1.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.000.000.000,00
1.1.3.01.	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMDA (DEVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	6.000.000.000,00
1.1.3.01.01	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMDA (DEVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH/BUMD	6.000.000.000,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	22.049.872.395,00
1.1.4.03.	PENERIMAAN JASA GIRO	4.000.000.000,00
1.1.4.03.01	JASA GIRO KAS DAERAH	4.000.000.000,00
1.1.4.04.	PENDAPATAN BUNGA	1.500.000.000,00
1.1.4.04.01	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	1.500.000.000,00
1.1.4.19.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	5.000.000.000,00
1.1.4.19.01	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	5.000.000.000,00
1.1.4.20.	DANA KAPITASI	11.549.872.395,00
1.1.4.20.01	DANA KAPITASI JKN DAN FKTP	11.549.872.395,00
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.117.064.939.828,00</b>
1.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	193.251.677.828,00
1.2.1.01.	BAGI HASIL PAJAK	92.261.855.000,00
1.2.1.01.01	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN	71.809.578.000,00
1.2.1.01.02	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN	8.083.059.000,00
1.2.1.01.03	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN	568.276.000,00
1.2.1.01.04	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21	5.551.548.000,00
1.2.1.01.05	BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU	262.490.000,00
1.2.1.01.06	BIAYA PUNGUT - PBB	2.427.931.000,00
1.2.1.01.07	PBB PENGEMBALIAN PUSAT / PBB BAGI RATA	3.558.973.000,00
1.2.1.02.	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	100.989.822.828,00
1.2.1.02.02	BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN	1.349.451.000,00
1.2.1.02.04	BAGI HASIL DARI IURAN TETAP (LAND-RENT)	417.006.000,00
1.2.1.02.05	BAGI HASIL DARI IURAN EKSPLORASI DAN IURAN EKSPLOITASI (ROYALTY)	5.244.201.000,00
1.2.1.02.07	BAGI HASIL DARI PUNGUTAN HASIL PERIKANAN	502.790.000,00
1.2.1.02.08	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	17.093.125.000,00
1.2.1.02.09	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN GAS BUMI	16.985.337.000,00
1.2.1.02.11	DANA BAGI HASIL KURANG BAYAR	59.397.912.828,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	714.704.528.000,00
1.2.2.01.	DANA ALOKASI UMUM	714.704.528.000,00
1.2.2.01.01	DANA ALOKASI UMUM	714.704.528.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	209.108.734.000,00
1.2.3.01.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	90.870.759.000,00
1.2.3.01.01	DAK BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN	26.955.761.000,00
1.2.3.01.02	DAK BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI	4.180.359.000,00
1.2.3.01.03	DAK BIDANG INFRASTRUKTUR AIR MINUM	5.072.408.000,00
1.2.3.01.04	DAK BIDANG INFRASTRUKTUR SANITASI	3.850.000.000,00
1.2.3.01.06	DAK BIDANG KESEHATAN DAN KB	29.718.023.000,00
1.2.3.01.09	DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.592.956.000,00
1.2.3.01.13	DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.460.243.000,00
1.2.3.01.15	DAK BIDANG PERTANIAN	2.291.288.000,00
1.2.3.01.18	DAK BIDANG PENDIDIKAN	14.280.461.000,00
1.2.3.01.19	DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	372.927.000,00
1.2.3.01.21	DAK BIDANG PARIWISATA	1.096.333.000,00
1.2.3.02.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	118.237.975.000,00
1.2.3.02.01	BELANJA OPERASIONAL PENYELENGGARARAAN PAUD	5.845.800.000,00
1.2.3.02.02	TUNJANGAN PROFESI GURU	85.007.115.000,00
1.2.3.02.03	DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	1.110.000.000,00
1.2.3.02.04	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	15.002.130.000,00
1.2.3.02.05	JAMINAN PERSALINAN	2.837.471.000,00
1.2.3.02.06	BANTUAN OPERASIONAL KB	3.497.698.000,00
1.2.3.02.07	PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.321.778.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.2.3.02.09	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	757.100.000,00
1.2.3.02.10	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	785.004.000,00
1.2.3.02.11	AKREDITASI PUSKESMAS	2.018.040.000,00
1.2.3.02.14	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	55.839.000,00
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>300.861.365.493,15</b>
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	44.361.400.000,00
1.3.1.05.	HIBAH DANA BOS	44.361.400.000,00
1.3.1.05.01	HIBAH DANA BOS	44.361.400.000,00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	63.103.329.493,15
1.3.3.01.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	63.103.329.493,15
1.3.3.01.01	BAGI HASIL DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	9.940.808.244,08
1.3.3.01.02	BAGI HASIL DARI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	8.394.979.477,66
1.3.3.01.03	BAGI HASIL DARI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	21.582.527.416,72
1.3.3.01.05	BAGI HASIL DARI PAJAK ROKOK	13.733.011.299,09
1.3.3.01.07	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	24.483.329,90
1.3.3.01.08	BAGI HASIL DARI PAJAK PROVINSI KURANG BAYAR 2019	9.427.519.725,70
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	180.596.636.000,00
1.3.4.01.	DANA PENYESUAIAN	180.596.636.000,00
1.3.4.01.03	DANA INSENTIF DAERAH	53.494.589.000,00
1.3.4.01.06	DANA DESA	127.102.047.000,00
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN	12.300.000.000,00
1.3.5.01.	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAINNYA	12.300.000.000,00
1.3.5.01.01	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.	12.300.000.000,00
1.3.6.	PENDAPATAN LAINNYA	500.000.000,00
1.3.6.01.	PENDAPATAN LAINNYA	500.000.000,00
1.3.6.01.01	PENDAPATAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA	500.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.517.553.705.721,92</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.577.731.344.036,34</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>829.701.478.695,34</b>
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	578.749.415.508,16
2.1.1.01.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	409.756.104.107,87
2.1.1.01.01	GAJI POKOK PNS/ UANG REPRESENTASI	300.303.313.852,10
2.1.1.01.02	TUNJANGAN KELUARGA	29.328.470.100,71
2.1.1.01.03	TUNJANGAN JABATAN	8.756.293.898,87
2.1.1.01.04	TUNJANGAN FUNGSIONAL	20.224.500.213,00
2.1.1.01.05	TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	3.720.056.536,25
2.1.1.01.06	TUNJANGAN BERAS	15.723.631.711,69
2.1.1.01.07	TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS	375.026.733,39
2.1.1.01.08	PEMBULATAN GAJI	4.415.565,70
2.1.1.01.09	IURAN JAMINAN KESEHATAN	78.461.045,85
2.1.1.01.10	UANG PAKET	75.923.733,38
2.1.1.01.11	TUNJANGAN BADAN MUSYAWARAH	17.986.575,21
2.1.1.01.12	TUNJANGAN KOMISI	41.100.690,62
2.1.1.01.13	TUNJANGAN BADAN ANGGARAN	18.018.722,79
2.1.1.01.14	TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN	6.895.657,52
2.1.1.01.15	TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA	9.628.200,34
2.1.1.01.16	TUNJANGAN PERUMAHAN	4.766.949.346,92
2.1.1.01.21	BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KDH/WKDH	400.000.000,00
2.1.1.01.22	IURAN BPJS KESEHATAN	16.027.245.850,68
2.1.1.01.23	IURAN JAMINAN KEMATIAN	1.825.647.624,72
2.1.1.01.24	IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA	614.582.548,13
2.1.1.01.25	TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTAN DPRD	2.250.000.000,00
2.1.1.01.26	TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTAN DPRD	5.187.955.500,00
2.1.1.02.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	151.117.115.000,00
2.1.1.02.06	TAMBAHAN PENGHASILAN KESEJAHTERAAN PNS	65.000.000.000,00
2.1.1.02.08	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	86.117.115.000,00
2.1.1.03.	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH	5.701.600.000,00
2.1.1.03.01	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	4.950.000.000,00
2.1.1.03.03	BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD	751.600.000,00
2.1.1.05.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	2.353.740.900,29
2.1.1.05.06	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK HOTEL	2.650.000,00
2.1.1.05.07	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK RESTORAN	50.000.000,00



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1.1.05.08	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK HIBURAN	28.575.000,00
2.1.1.05.09	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK REKLAME	50.000.000,00
2.1.1.05.10	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK PENERANGAN JALAN	888.490.322,80
2.1.1.05.11	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK PARKIR	3.000.000,00
2.1.1.05.12	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK AIR TANAH	5.000.000,00
2.1.1.05.13	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK SARANG BURUNG WALET	1.500.000,00
2.1.1.05.14	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	125.000.000,00
2.1.1.05.15	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	298.025.577,49
2.1.1.05.16	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	901.500.000,00
2.1.1.06.	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	290.055.500,00
2.1.1.06.02	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	7.500.000,00
2.1.1.06.06	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PELAYANAN PASAR	7.500.000,00
2.1.1.06.07	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	17.244.500,00
2.1.1.06.14	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	22.500.000,00
2.1.1.06.15	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	51.250.000,00
2.1.1.06.17	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - TEMPAT PELELANGAN	50.000,00
2.1.1.06.18	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - TERMINAL	511.000,00
2.1.1.06.21	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - RUMAH POTONG HEWAN	1.000.000,00
2.1.1.06.23	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	30.000.000,00
2.1.1.06.25	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	2.500.000,00
2.1.1.06.26	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	150.000.000,00
2.1.1.07.	BELANJA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN	9.530.800.000,00
2.1.1.07.01	BELANJA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN	9.530.800.000,00
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	1.000.000.000,00
2.1.3.01.	BELANJA SUBSIDI	1.000.000.000,00
2.1.3.01.02	BELANJA SUBSIDI KEPADA BUMD	1.000.000.000,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	13.475.800.000,00
2.1.4.05.	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	13.475.800.000,00
2.1.4.05.01	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN/BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA	13.475.800.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	7.157.752.800,00
2.1.6.05.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA	7.157.752.800,00
2.1.6.05.01	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA	7.157.752.800,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	228.318.510.387,18
2.1.7.03.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	227.197.667.582,80
2.1.7.03.01	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA	227.197.667.582,80
2.1.7.04.	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK	1.120.842.804,38
2.1.7.04.01	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK.	1.120.842.804,38
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
2.1.8.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
2.1.8.01.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>748.029.865.341,00</b>
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.364.656.937,00
2.2.1.01.	HONORARIUM PNS	17.950.861.937,00
2.2.1.01.01	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	11.971.324.437,00
2.2.1.01.02	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.750.000,00
2.2.1.01.04	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	143.160.000,00
2.2.1.01.05	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	723.655.000,00
2.2.1.01.06	HONORAIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA	722.772.500,00
2.2.1.01.07	HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN/BARANG	286.800.000,00
2.2.1.01.08	HONORAIUM KUASA PENGGUNA ANGGARAN	765.300.000,00
2.2.1.01.09	HONORARIUM PPTK	1.617.300.000,00
2.2.1.01.10	HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	453.300.000,00
2.2.1.01.11	HONORARIUM BENDAHARA PENERIMAAN	50.100.000,00
2.2.1.01.12	HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN	970.200.000,00
2.2.1.01.14	HONORARIUM PEMEGANG BARANG SKPD	111.600.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.1.01.15	HONORARIUM PESERTA PELATIHAN, BINTEK DAN SOSIALISASI	25.000.000,00
2.2.1.01.16	HONORARIUM KOORDINATOR/OPERATOR	2.400.000,00
2.2.1.01.17	HONORARIUM BENDAHARAWAN UMUM DAERAH (BUD)	96.000.000,00
2.2.1.01.19	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	7.200.000,00
2.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS	46.357.245.000,00
2.2.1.02.02	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP	37.190.970.000,00
2.2.1.02.03	HONORARIUM TENAGA HARIAN/LEPAS	7.091.695.000,00
2.2.1.02.04	HONORARIUM JASA KERJA	1.888.105.000,00
2.2.1.02.05	HONORARIUM PESERTA PELATIHAN, BINTEK DAN SOSIALISASI	186.475.000,00
2.2.1.06.	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI	56.550.000,00
2.2.1.06.01	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI PNS	10.750.000,00
2.2.1.06.02	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI NON PNS	45.800.000,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	319.375.892.813,00
2.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	17.837.737.363,15
2.2.2.01.01	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	8.406.117.572,74
2.2.2.01.03	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK ( LAMPU PIJAR, BATTERY KERING)	1.365.467.862,00
2.2.2.01.04	BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA	427.724.000,00
2.2.2.01.05	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	2.196.357.673,41
2.2.2.01.06	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS	538.251.400,00
2.2.2.01.07	BELANJA PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	32.628.000,00
2.2.2.01.08	BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS	377.182.000,00
2.2.2.01.10	BELANJA UMBUL-UMBUL	43.670.000,00
2.2.2.01.11	BELANJA BAHAN MEDIS	2.467.938.455,00
2.2.2.01.12	BELANJA PIRING/GELAS/MANGKOK/CANGKIR/SENDOK/GARPU/PISAU	182.390.400,00
2.2.2.01.13	BELANJA RUMAH TANGGA KDH/WKDH	207.000.000,00
2.2.2.01.14	BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD	780.000.000,00
2.2.2.01.15	BELANJA PERALATAN OLAH RAGA (BOS)	813.010.000,00
2.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	18.798.135.057,00
2.2.2.02.01	BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN	6.094.165.084,00
2.2.2.02.02	BELANJA BAHAN/BIBIT TANAMAN	2.019.706.000,00
2.2.2.02.03	BELANJA BIBIT TERNAK	288.400.000,00
2.2.2.02.04	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	4.991.842.695,00
2.2.2.02.05	BELANJA BAHAN KIMIA	1.360.050.000,00
2.2.2.02.06	BELANJA PERSEDIAAN MAKANAN POKOK	62.500.000,00
2.2.2.02.07	BELANJA PERALATAN KERJA	411.427.000,00
2.2.2.02.08	BELANJA BAHAN PUPUK	870.600.000,00
2.2.2.02.09	BELANJA BAHAN PAKAN TERNAK	72.000.000,00
2.2.2.02.10	BELANJA BAHAN DOKUMENTASI/DEKORASI	1.880.385.318,00
2.2.2.02.11	BELANJA BAHAN PAMERAN/PERCONTOHAN	339.893.000,00
2.2.2.02.12	BELANJA BAHAN PELATIHAN	311.180.000,00
2.2.2.02.13	BELANJA BAHAN ALAT KONTRASEPSI	6.111.260,00
2.2.2.02.15	BELANJA PERLENGKAPAN KAMAR/ZAAL/RUANGAN RUMAH SAKIT	89.874.700,00
2.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	23.007.317.591,00
2.2.2.03.01	BELANJA TELEPON	1.357.457.044,00
2.2.2.03.02	BELANJA AIR	1.008.469.000,00
2.2.2.03.03	BELANJA LISTRIK	10.301.000.000,00
2.2.2.03.05	BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH	1.037.693.500,00
2.2.2.03.06	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET	863.960.000,00
2.2.2.03.07	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN	87.837.200,00
2.2.2.03.08	BELANJA SERTIFIKASI	524.590.000,00
2.2.2.03.12	BELANJA IKLAN/PUBLIKASI	3.504.050.000,00
2.2.2.03.14	BELANJA JASA PERBAIKAN PERLENGKAPAN KANTOR	162.100.000,00
2.2.2.03.15	BELANJA JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	1.542.837.746,00
2.2.2.03.16	BELANJA JASA PERBAIKAN MEBEULEUR	92.200.000,00
2.2.2.03.17	BELANJA JASA PERBAIKAN ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	40.000.000,00
2.2.2.03.19	BELANJA JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.570.899.101,00
2.2.2.03.20	BELANJA JASA HOSTING	34.000.000,00
2.2.2.03.21	BELANJA JASA KERJA	880.224.000,00
2.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	10.050.738.500,00
2.2.2.04.01	BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN	9.692.154.000,00
2.2.2.04.02	BELANJA PREMI ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	330.834.500,00
2.2.2.04.03	BELANJA PREMI JIWA	27.750.000,00
2.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	13.126.912.000,00
2.2.2.05.01	BELANJA JASA SERVICE	493.482.500,00
2.2.2.05.02	BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG	2.412.030.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.05.03	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS	9.258.449.500,00
2.2.2.05.04	BELANJA JASA KIR	21.400.000,00
2.2.2.05.05	BELANJA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	911.550.000,00
2.2.2.05.06	BELANJA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	30.000.000,00
2.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	14.411.496.380,00
2.2.2.06.01	BELANJA CETAK	9.127.863.039,00
2.2.2.06.02	BELANJA PENGGANDAAN	5.283.633.341,00
2.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	5.258.056.000,00
2.2.2.07.02	BELANJA SEWA GEDUNG/ KANTOR/TEMPAT	1.151.246.000,00
2.2.2.07.03	BELANJA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN	1.821.460.000,00
2.2.2.07.05	BELANJA SEWA PENGINAPAN/HOTEL	2.285.350.000,00
2.2.2.08.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	1.253.517.000,00
2.2.2.08.01	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT	1.252.017.000,00
2.2.2.08.02	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS AIR	1.500.000,00
2.2.2.09.	BELANJA SEWA ALAT BERAT	150.000.000,00
2.2.2.09.01	BELANJA SEWA ESKAVATOR	150.000.000,00
2.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	4.306.719.500,00
2.2.2.10.01	BELANJA SEWA MEJA KURSI	132.110.000,00
2.2.2.10.04	BELANJA SEWA GENERATOR	19.000.000,00
2.2.2.10.05	BELANJA SEWA TENDA	1.357.300.000,00
2.2.2.10.06	BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL	128.309.500,00
2.2.2.10.07	BELANJA SEWA SOUND SYSTEM	501.100.000,00
2.2.2.10.09	BELANJA SEWA ALAT KEBERSIHAN	5.000.000,00
2.2.2.10.11	BELANJA SEWA ALAT PRAKTEK	12.400.000,00
2.2.2.10.12	BELANJA SEWA PERALATAN DEKORASI PANGGUNG	188.000.000,00
2.2.2.10.14	BELANJA SEWA TAMAN	116.000.000,00
2.2.2.10.15	BELANJA SEWA PERALATAN LISTRIK	276.500.000,00
2.2.2.10.16	BELANJA SEWA INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)	690.000.000,00
2.2.2.10.17	BELANJA SEWA WEB HOSTING	195.000.000,00
2.2.2.10.18	BELANJA SEWA AC	56.000.000,00
2.2.2.10.20	BELANJA SEWA BALIHO	630.000.000,00
2.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	16.475.210.618,00
2.2.2.11.01	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	426.476.000,00
2.2.2.11.02	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	5.488.452.906,00
2.2.2.11.03	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	1.243.096.854,00
2.2.2.11.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN	128.767.000,00
2.2.2.11.05	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN	540.000.000,00
2.2.2.11.06	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN	8.171.417.858,00
2.2.2.11.08	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN KDH/WKDH	477.000.000,00
2.2.2.12.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	1.524.205.244,00
2.2.2.12.01	BELANJA PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH	92.800.000,00
2.2.2.12.02	BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	268.000.000,00
2.2.2.12.04	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	194.600.000,00
2.2.2.12.05	BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)	448.095.244,00
2.2.2.12.06	PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)	124.000.000,00
2.2.2.12.07	BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)	396.710.000,00
2.2.2.13.	BELANJA PAKAIAN KERJA	1.207.912.500,00
2.2.2.13.01	BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN	1.074.612.500,00
2.2.2.13.02	BELANJA PAKAIAN BATIK	26.250.000,00
2.2.2.13.03	BELANJA PAKAIAN PRAMUSAJI	15.000.000,00
2.2.2.13.04	BELANJA PAKAIAN MUSLIM/KOKO	92.050.000,00
2.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	1.821.031.930,00
2.2.2.14.02	BELANJA PAKAIAN ADAT DAERAH	165.450.000,00
2.2.2.14.03	BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL	557.340.000,00
2.2.2.14.04	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	1.098.241.930,00
2.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	75.196.051.044,85
2.2.2.15.01	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	26.170.191.787,00
2.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	48.825.859.257,85
2.2.2.15.03	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	200.000.000,00
2.2.2.18.	BELANJA PEMELIHARAAN	31.572.560.069,00
2.2.2.18.02	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	248.200.000,00
2.2.2.18.03	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	1.231.416.935,00
2.2.2.18.04	BELANJA PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	28.655.703.134,00
2.2.2.18.05	BELANJA PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	487.240.000,00
2.2.2.18.07	BELANJA PEMELIHARAAN LAMPU JALAN	660.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.18.06	BELANJA PEMELIHARAAN (KALIBRASI ALAT-ALAT LABORATORIUM)	290.000.000,00
2.2.2.19.	BELANJA JASA KONSULTANSI	8.081.207.600,00
2.2.2.19.01	BELANJA JASA KONSULTANSI PENELITIAN	243.900.000,00
2.2.2.19.02	BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN	5.482.487.600,00
2.2.2.19.03	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN	11.800.000,00
2.2.2.19.04	BELANJA JASA KONSULTANSI PENDATAAN	1.278.370.000,00
2.2.2.19.05	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGEMBANGAN	186.500.000,00
2.2.2.19.06	BELANJA JASA KONSULTANSI LAINNYA	878.150.000,00
2.2.2.21.	BELANJA HIBAH BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	34.881.525.400,00
2.2.2.21.01	BELANJA HIBAH BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	31.564.425.400,00
2.2.2.21.02	BELANJA HIBAH BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA	3.317.100.000,00
2.2.2.24.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	6.706.196.869,00
2.2.2.24.01	BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT/ PELATIHAN	3.739.262.269,00
2.2.2.24.03	BELANJA BIMBINGAN TEKNIS	1.925.342.600,00
2.2.2.24.04	BELANJA DIKLAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	960.592.000,00
2.2.2.24.05	BELANJA ASDEKSI DAN ADKASI	81.000.000,00
2.2.2.25.	BELANJA JASA LAINNYA	18.676.093.650,00
2.2.2.25.01	BELANJA JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER	9.765.165.000,00
2.2.2.25.02	BELANJA JASA MODERATOR	26.600.000,00
2.2.2.25.03	BELANJA JASA TENAGA PENGAWAS/AUDITOR	2.461.118.650,00
2.2.2.25.04	BELANJA JASA MEDIS	4.322.320.000,00
2.2.2.25.06	BELANJA JASA KONTRIBUSI	675.382.000,00
2.2.2.25.07	BELANJA BIAYA PENDAFTARAN LOMBA (BOS)	1.107.886.000,00
2.2.2.25.08	BELANJA IURAN/SETORAN (BOS)	317.622.000,00
2.2.2.26.	BELANJA PENGHARGAAN	2.420.737.297,00
2.2.2.26.01	BELANJA HADIAH BAGI YANG BERPRESTASI	2.420.737.297,00
2.2.2.28.	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI	12.568.781.200,00
2.2.2.28.01	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI PNS	6.229.501.200,00
2.2.2.28.02	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI NON PNS	6.339.280.000,00
2.2.2.29.	BELANJA UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	43.750.000,00
2.2.2.29.01	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	43.750.000,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	364.289.315.591,00
2.2.3.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BESAR DARAT	4.000.000.000,00
2.2.3.14.02	BELANJA MODAL PENGADAAN GRADER	4.000.000.000,00
2.2.3.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BANTU	4.535.417.325,00
2.2.3.16.04	BELANJA MODAL PENGADAAN ELECTRIC GENERATING SET	4.455.309.325,00
2.2.3.16.05	BELANJA MODAL PENGADAAN POMPA	80.108.000,00
2.2.3.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	10.416.845.465,00
2.2.3.17.02	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	1.770.000.000,00
2.2.3.17.05	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	1.356.950.000,00
2.2.3.17.07	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA EMPAT	5.739.895.465,00
2.2.3.17.08	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA ENAM	1.550.000.000,00
2.2.3.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BENGKEL BERMESIN	40.000.000,00
2.2.3.22.04	BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS BENGKEL SERVICE	40.000.000,00
2.2.3.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	20.993.415,00
2.2.3.23.02	BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	20.993.415,00
2.2.3.24.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR	1.565.800.000,00
2.2.3.24.05	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR LAINNYA	1.565.800.000,00
2.2.3.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPAN	81.500.000,00
2.2.3.26.03	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENYIMPANAN	81.500.000,00
2.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR	5.699.794.431,00
2.2.3.27.04	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	741.435.421,00
2.2.3.27.05	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA	3.903.289.010,00
2.2.3.27.06	BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN REKLAME	438.000.000,00
2.2.3.27.08	BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN MERK	139.400.000,00
2.2.3.27.09	BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN INFORMASI	477.670.000,00
2.2.3.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA	7.114.517.268,00
2.2.3.28.01	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR	2.811.370.763,00
2.2.3.28.02	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENGUKUR WAKTU	38.181.000,00
2.2.3.28.03	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMBERSIH	60.483.875,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.28.04	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENDINGIN	1.267.690.844,00
2.2.3.28.05	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT DAPUR	142.870.628,00
2.2.3.28.06	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	2.679.055.158,00
2.2.3.28.07	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	114.865.000,00
2.2.3.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	10.752.183.079,00
2.2.3.29.02	BELANJA MODAL PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER	7.833.230.441,00
2.2.3.29.03	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER MAINFRAME	65.000.000,00
2.2.3.29.05	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	2.350.931.074,00
2.2.3.29.06	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN JARINGAN	341.125.500,00
2.2.3.29.07	BELANJA MODAL SOFTWARE	161.896.064,00
2.2.3.30.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA	429.723.068,00
2.2.3.30.01	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT	108.750.120,00
2.2.3.30.02	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA RAPAT PEJABAT	67.500.000,00
2.2.3.30.03	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA PEJABAT	114.625.090,00
2.2.3.30.04	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RAPAT PEJABAT	47.347.858,00
2.2.3.30.06	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	91.500.000,00
2.2.3.31.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO	387.750.000,00
2.2.3.31.01	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN STUDIO VISUAL	377.750.000,00
2.2.3.31.02	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	10.000.000,00
2.2.3.32.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI	94.827.000,00
2.2.3.32.01	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE/SMARTPHONE	82.327.000,00
2.2.3.32.03	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	12.500.000,00
2.2.3.34.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN	6.391.251.422,00
2.2.3.34.01	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM	3.174.072.967,00
2.2.3.34.02	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GIGI	1.736.946.455,00
2.2.3.34.09	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	943.580.000,00
2.2.3.34.18	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGI	536.652.000,00
2.2.3.35.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN	9.494.551.379,00
2.2.3.35.01	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN PERAWATAN	1.150.088.265,00
2.2.3.35.06	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN OLAHRAGA	160.275.000,00
2.2.3.35.07	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN INSTALASI GAWAT DARURAT	1.785.415.934,00
2.2.3.35.08	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN INSTALASI RAWAT INAP	2.927.331.045,00
2.2.3.35.09	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN INSTALASI BEDAH SENTRAL	1.201.065.615,00
2.2.3.35.10	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN INSTALASI RAWAT JALAN	2.270.375.520,00
2.2.3.36.	BELANJA MODAL PENGADAAN UNIT-UNIT LABORATORIUM	3.375.132.338,00
2.2.3.36.12	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UMUM	35.000.000,00
2.2.3.36.14	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KEDOKTERAN	854.732.338,00
2.2.3.36.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KIMIA	735.400.000,00
2.2.3.36.64	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM LAINNYA	1.750.000.000,00
2.2.3.37.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	3.147.500.000,00
2.2.3.37.07	BELANJA MODAL PENGADAAN BIDANG STUDI : IPS	130.000.000,00
2.2.3.37.10	BELANJA MODAL PENGADAAN BIDANG STUDI : KESENIAN	1.828.000.000,00
2.2.3.37.11	BELANJA MODAL PENGADAAN BIDANG STUDI : OLAH RAGA	160.000.000,00
2.2.3.37.13	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH BIDANG PENDIDIKAN/KETERAMPILAN LAIN-LAIN	544.500.000,00
2.2.3.37.14	BELANJA MODAL PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN	485.000.000,00
2.2.3.42.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1.125.243.000,00
2.2.3.42.02	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	1.125.243.000,00
2.2.3.45.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERSENJATAAN NON SENJATA API	1.966.000,00
2.2.3.45.01	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEAMANAN	1.966.000,00
2.2.3.48.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN	533.243.701,00
2.2.3.48.01	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BANTU KEAMANAN	533.243.701,00
2.2.3.49.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	44.276.208.000,00
2.2.3.49.01	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR	25.043.897.300,00
2.2.3.49.04	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	708.500.000,00
2.2.3.49.05	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	1.646.500.000,00
2.2.3.49.06	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN KESEHATAN	5.191.815.000,00
2.2.3.49.09	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	105.395.000,00
2.2.3.49.10	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	7.950.331.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.49.11	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	657.358.700,00
2.2.3.49.13	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	199.760.000,00
2.2.3.49.19	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	180.000.000,00
2.2.3.49.27	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	2.592.651.000,00
2.2.3.50.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1.015.900.000,00
2.2.3.50.01	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I	1.015.900.000,00
2.2.3.52.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN BERSEJARAH	1.086.516.350,00
2.2.3.52.06	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENUNJANG TEMPAT WISATA	1.086.516.350,00
2.2.3.53.	BELANJA MODAL PENGADAAN TUGU PERINGATAN	375.873.750,00
2.2.3.53.03	BELANJA MODAL PENGADAAN TUGU PERINGATAN LAINNYA	375.873.750,00
2.2.3.60.	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN	207.569.307.000,00
2.2.3.60.03	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	38.095.000.000,00
2.2.3.60.04	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN DESA	169.474.307.000,00
2.2.3.61.	BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN	6.500.000.000,00
2.2.3.61.03	BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN KABUPATEN/KOTA	6.500.000.000,00
2.2.3.62.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR IRIGASI	8.085.000.000,00
2.2.3.62.07	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	8.085.000.000,00
2.2.3.67.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	8.205.561.630,00
2.2.3.67.02	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/BAKU	267.303.630,00
2.2.3.67.05	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	7.938.258.000,00
2.2.3.68.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR KOTOR	4.244.630.000,00
2.2.3.68.06	BELANJA MODAL PENGADAAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	4.244.630.000,00
2.2.3.71.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI AIR KOTOR	500.000.000,00
2.2.3.71.01	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI AIR KOTOR	500.000.000,00
2.2.3.74.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	402.320.000,00
2.2.3.74.09	BELANJA MODAL PENGADAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TENAGA SURYA (PLTS)	402.320.000,00
2.2.3.75.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI GARDU LISTRIK	60.000.000,00
2.2.3.75.02	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	60.000.000,00
2.2.3.80.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN LISTRIK	1.978.500.000,00
2.2.3.80.01	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN LISTRIK	1.978.500.000,00
2.2.3.83.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU	8.688.320.000,00
2.2.3.83.01	BELANJA MODAL PENGADAAN UMUM	8.668.515.000,00
2.2.3.83.03	BELANJA MODAL PENGADAAN AGAMA	19.805.000,00
2.2.3.86.	BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	2.085.439.970,00
2.2.3.86.03	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESENIAN	729.107.000,00
2.2.3.86.04	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT OLAH RAGA	1.356.332.970,00
2.2.3.89.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAMAN	7.500.000,00
2.2.3.89.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAMAN PERKEBUNAN	7.500.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>1.577.731.344.036,34 (60.177.638.314,42)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>60.177.638.314,42</b>
<b>3.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>65.177.638.314,42</b>
3.1.1.	PENGGUNAAN SILPA	65.177.638.314,42
3.1.1.01.	PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA	65.177.638.314,42
3.1.1.01.02	ESTIMASI SILPA	65.177.638.314,42
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>65.177.638.314,42</b>
<b>3.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	5.000.000.000,00
3.2.2.02.	PENYERTAAN MODAL PADA BUMD	5.000.000.000,00
3.2.2.02.01	PENYERTAAN MODAL PADA BUMD	5.000.000.000,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>60.177.638.314,42</b>
<b>3.3</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0</b>